
**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2013 – 2017**

Muhammad Arif

email: m.arif29k@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Fefri Indra Arza

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of regional financial independence, effectiveness of PAD, efficiency of regional expenditures and harmony of expenditure on the allocation of capital expenditure. The sample used in this study is the entire population, namely 19 regencies / municipalities covering 12 regencies and 7 municipalities in West Sumatra Province. The research period is 2013-2016, so the total sample data is 76 sample data. The analysis is carried out using Eviews 8. The results of testing of the four factors that influence the allocation of capital expenditures show that regional financial independence and effectiveness of PAD do not affect the allocation of capital expenditure, while regional financial efficiency and harmonious regional expenditure have a significant positive effect on the allocation of capital expenditure .

Keywords: *Regional Financial Independence, Effectiveness, Local Revenue, Efficiency of Regional Expenditures, Harmony of Expenditures and Allocation of Capital Expenditures.*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, serta sesuai dengan peraturan perundangan merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah ini bertujuan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggali potensi serta menentukan alokasi sumber dayanya ke dalam belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, menunjukkan kinerja keuangan daerah tersebut. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Saputra (2014) mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil pada antar periode, hal ini dalam rangka mengetahui bagaimana

kecenderungan yang terjadi. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah pada penelitian ini meliputi 4 (empat) rasio, yaitu: (1)Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2)Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (4) Rasio Keserasian Belanja dan rasio Pertumbuhan. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Kinerja keuangan daerah dapat dikatakan baik jika daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Kemandirian merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar kanpajak dan retribusi kepada daerahnya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Namun demikian fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat. Hal ini ditunjukkan dari data bahwa lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan berat keuangan), karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (sumbar.antarnews.com).

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) juga masih berjalan lambat. Berdasarkan data tahun 2017, capaian belanja tak langsung sepanjang semester I hanya 38,54 persen dari alokasi belanja sekitar Rp 6,2 triliun. Sementara, belanja langsung termasuk belanja modal baru 31,96 persen, selain itu sebagian besar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru membelanjakan 20 persen anggaran belanja yang dialokasikan (www.republika.co.id). Pada APBD 2018, proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di beberapa Kabupaten/Kota dan juga provinsi masih berada dibawah Belanja Modal rata-rata nasional. (<http://m.valoraco.id>). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

1.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan menguji permasalahan tersebut melalui berbagai faktor terkait kemandirian

keuangan daerah dan PAD. Dengan demikian perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kinerja keuangan mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Perumusan permasalahan tersebut secara spesifik akan dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut ini.

- a. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal
- b. Bagaimana pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal
- c. Bagaimana pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.
- d. Bagaimana pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, yaitu:

- a. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal
- b. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal
- c. Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.
- d. Pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal.

1.3. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja Modal.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam hal mengukur dan menganalisa kinerja keuangan dan pengalokasian belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat
- c. Bagi Pihak-Pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Kemampuan daerah dalam meningkatkan anggaran belanja modal erat hubungannya dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal.

2.1. Belanja Modal

Fees (2008) mengemukakan bahwa Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap dalam rangka meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Berbagai penelitian mengenai belanja modal telah dilakukan antara lain oleh Dinarossi dan Darma (2016), yang memperoleh hasil bahwa efisiensi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara terkait dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektifitas Belanja Daerah, penelitian Gerungan, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektifitas Belanja Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Suwandi dan Afrizal (2015), yang menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan fiskal memiliki pengaruh negatif pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD derajat tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Penelitian lainnya yang dilakukan Arsa dan Djinar (2015) memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, sedangkan ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

2.2. Kinerja Keuangan

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pada masyarakat yang merupakan *stakeholder* pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja yang membantu manajer publik dalam pengendalian organisasi.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dicapai suatu organisasi. Penilaian kinerja pemerintah

daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2004). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2004) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya dengan menggunakan pendapatannya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin tinggi, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

2. Efektifitas PAD

Pengertian efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

3. Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio ini dihitung melalui perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Penghitungan realisasi PAD ini membutuhkan data tambahan tentang biaya pemungutan PAD, karena yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran.

4. Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi

(pembangunan) digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil

2.3. Hubungan antara Kemandirian dengan Belanja Modal

Saat ini kondisi kemandirian Pemerintah Daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Saliman (2016) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera masih sangat rendah, hal ini memperlihatkan bahwa daerah Kabupaten di Pulau Sumatera masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Utomo (2012) dalam Suwandi dan Afrizal (2015), mengindikasikan kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan. Dinarossi dan Darma (2016), menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja Modal. Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

2.4. Hubungan antara Efektivitas PAD dengan Alokasi Belanja Modal

Rasio efektivitas PAD menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah dinilai semakin baik. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Darwanto dan Yustikasari (2007), mengemukakan bahwa PAD akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mengalokasikan Belanja Modal. Berdasarkan argumen di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2.5. Hubungan antara Efisiensi Keuangan dengan Alokasi Belanja Modal

Adanya desentralisasi fiskal mengharapakan setiap daerah untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Semakin kecil nilai efisiensi berarti semakin efisien suatu daerah dan mengindikasikan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efisiennya suatu daerah diharapkan juga berdampak pada nilai pengalokasian Belanja Modalnya sebagai

wujud pembangunan daerah. Dinarossi dan Darma (2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel Efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan argumen diatas maka dirumuskan hipotesis:

H₃: Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

4.6. Hubungan antara Keserasian Belanja dengan Alokasi Belanja Modal.

Rasio Keserasian Belanja merupakan gambaran bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Gerungan, dkk (2015) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa variabel keserasian belanja berpengaruh positif secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini juga ingin melihat pengaruh keserasian belanja ini terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Keserasian Belanja berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif (*causative*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2004). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), Efektivitas PAD (X_2), Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) dan Keserasian Belanja (X_4) sebagai variabel independen terhadap Alokasi Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling*) yaitu seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. . Data yang diteliti adalah realisasi anggaran dan APBD, yang merupakan data *time series* laporan realisasi anggaran dan APBD. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam kurun waktu 2013 – 2017. Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini adalah 76 sampel.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen terdiri dari: pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), Efektivitas PAD (X_2), Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) dan Keserasian Belanja (X_4) , sementara variabel dependennya adalah Alokasi

Belanja Modal (Y). Definisi dan formulasi pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

2. Efektivitas PAD

Efektivitas PAD (X_2), variabel ini adalah variable independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Anggaran PAD, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah (X_3), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Total Belanja dengan Realisasi Total Pendapatan, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Keserasian Belanja

Keserasian Belanja (X_4) variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Realisasi Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio.

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Alokasi Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal (Y), variabel ini adalah variabel dependen yang merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Modal dengan Anggaran Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio. Alokasi Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data belanja modal pada APBD di tahun berikutnya.

3.3. Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah Eviews 8. Prosedur pengujiannya yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada hasil uji statistik. Jika nilai signifikansi pada hasil uji statistik $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi pada hasil uji statistik $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t-statistik bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel dependen terhadap variabel independen, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari nilai yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun model persamaan data panel yang digunakan adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \varepsilon$$

dimana:

Y adalah Alokasi Belanja Modal

$X1$ adalah Kemandirian Keuangan Daerah

$X2$ adalah Efektifitas PAD

$X3$ adalah Efisiensi Keuangan Daerah

$X4$ adalah Keserasian Belanja

i adalah Kabupaten/Kota

t adalah periode waktu ke- t

ε adalah *error correction*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Barat secara administratif terdiri atas 19 Kabupaten/Kota. Dimana kabupaten terdiri dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat, Sementara kota terdiri dari Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi adalah seluruh Kabupaten/Kota tersebut.

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Nilai rata-rata (mean) Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 21.96. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 Alokasi belanja modal daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nilai rata-rata (mean) rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 9.33. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 rasio kemandirian keuangan daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	21.96252	9.330535	104.2287	98.37232	20.87892
Median	20.54303	8.223914	103.2993	97.60990	20.35098
Maximum	38.86475	27.19881	136.1603	110.3625	31.20927
Minimum	11.33157	3.990481	77.02053	85.55301	11.93668
Std. Dev.	6.146428	4.476360	13.62735	4.389911	5.329023
Skewness	0.515534	1.774528	0.104253	0.426953	0.329790
Kurtosis	2.554893	6.993580	2.692450	3.701308	2.078981
Jarque-Bera	3.993867	90.39084	0.437196	3.866459	4.063855
Probability	0.135751	0.000000	0.803645	0.144680	0.131083
Sum	1669.152	709.1207	7921.379	7476.296	1586.798
Sum Sq. Dev.	2833.393	1502.835	13927.86	1445.349	2129.886
Observations	76	76	76	76	76

Nilai rata-rata (*mean*) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 104.22. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 Rasio Efektivitas PAD daerah secara garis besar telah mencapai 100 persen bahkan lebih. Nilai rata-rata (*mean*) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 98.37. Sementara nilai rata-rata (*mean*) rasio Keserasian Belanja daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 20.87. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 rasio Keserasian Belanja daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

4.2. Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikan pada 0,000 ($\text{sig } 0,000 < 0,05$). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix. maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara

bersama-sama. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,924. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah mempunyai kontribusi menjelaskan Alokasi Belanja Modal sebesar 92.4 persen sedangkan sisanya 7.6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut ini.

1. Hipotesis 1, nilai probabilitas sebesar 0.3979 lebih besar ($>$) dari 0,05, maka H_1 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Hipotesis 2, nilai probabilitas sebesar 0.7636 lebih besar ($>$) dari 0,05, maka H_2 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas PAD (X_2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Hipotesis 3, nilai probabilitas sebesar 0.0231 lebih kecil ($<$) dari 0,05, maka H_3 diterima. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.
4. Hipotesis 4, nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil ($<$) dari 0,00, maka H_4 diterima. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keserasian Belanja (X_4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.

Tabel 2. Persamaan Regresi Data Panel dengan *Random Effects*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/12/18 Time: 00:19				
Sample: 2013 2016				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 17				
Total panel (balanced) observations: 68				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.044767	0.052575	0.851489	0.3979
X2	-0.003784	0.012524	-0.302155	0.7636
X3	0.121459	0.052100	2.331252	0.0231
X4	1.034919	0.042779	24.19196	0.0000
C	-11.98723	5.296682	-2.263159	0.0273
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.743675	0.3125
Period fixed (dummy variables)				
Idiosyncratic random			1.103005	0.6875
Weighted Statistics				
R-squared	0.923666	Mean dependent var	21.63622	
Adjusted R-squared	0.914761	S.D. dependent var	3.876358	
S.E. of regression	1.131732	Sum squared resid	76.84900	
F-statistic	103.7177	Durbin-Watson stat	1.913840	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.954292	Mean dependent var	21.63622	
Sum squared resid	110.0119	Durbin-Watson stat	1.419860	

4.3. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan bahwa daerah di wilayah Sumatera Barat telah sanggup untuk menerima tugas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri sehingga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011), yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian juga senada dengan penelitian Assyurriani (2015), yang menemukan hasil bahwa rasio tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.4. Pengaruh Efektivitas PAD Dengan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Praza (2016) tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi menemukan bahwa Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menemukan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Assyurriani (2015) juga menemukan hasil bahwa efektivitas PAD daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan penelitian Miranti (2017) tentang analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015, yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

4.5. Pengaruh Efisiensi Keuangan Dengan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Efisiensi Keuangan Daerah memiliki hubungan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dinarossi dan Darma (2016) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efisiensi keuangan daerah dan variable kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Sedangkan secara parsial, masing-masing variabel mempunyai arah yang sesuai dengan teori dimana kedua variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015), Gerungan dkk, (2015) dan penelitian Pramono (2014) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

4.6. Pengaruh Keserasian Belanja Dengan Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Keserasian Belanja berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gerungan, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja

Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keserasian Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil penelitian Prihastuti, dkk (2011) yang menunjukkan bahwa Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.
2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.
3. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.
4. Keserasian Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.

5.2. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bahwa dalam melakukan pengeluaran daerah, tidak semata-mata melalui pengalokasian belanja modal secara langsung, melainkan dapat mempertimbangan pengeluaran untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait.
3. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti rasio likuiditas, dan solvabilitas, sehingga hasil penelitian lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang*. Online 26 November 2013.
- Arsa, I. K dan Setiawina Nyoman Djinar. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013*. Tesis S-2 Pascasarjana Universitas Udayana,
- Assyurriani, 2015. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Tanjungpinang*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *SNA X*.
- Dinarossi, Utami dan Yanti Darma. 2016. Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal. *Jurnal Adminika*, Vol. 2 (2): 61-77.
- Fees, Warren Reeve. 2008. *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Salemba Empat. Jakarta.
- Gerungan Sylvia Febriany, Saerang David P.E. dan Pontoh Winston. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Sam Ratulangi
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10(2).
- Miranti, Putri Retno. 2017. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta*. *Jurnal Among Makarti*, Vol 7 (13): 83-112
- Praza, E. I. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 (1): 25-36.
- Prihastuti, Asepma Hygi, Taufik Taufeni, dan Agusti Restu. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*. *Jurnal Ilmiah*, Vol.10, No.2:143 – 154 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Saliman. 2016. *Analisis Pemerataan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*. Thesis, Universitas Andalas.

Saputra. Fegi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI*. Skripsi Dipublikasikan.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol. 1 (2): 109-124

Suwandi Kurni Adi dan Tahar Afrizal. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, Vol. 11 (2): 118-136

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggaran-sumbar-masih-lambat>. Terakhir diakses 01 Desember 2018.

<http://m.valora.co.id/berita/10655/inilah-catatan-pemprov-sumbar-untuk-pengalokasian-anggaran-di-apbd-2019.html>. Terakhir diakses 01 Desember 2018.